

Paradoks Kemakmuran: Mengungkap Dampak Produksi Kelapa Sawit terhadap Kemiskinan di Pedesaan Indonesia

Ikhsan, Vellayati Hajad, Irham Maulida

Universitas Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 13 Januari 2025

Revised: 15 Februari 2025

Accepted : 05 April 2025

KEYWORDS

Paradox; prosperity; production; palm oil; poverty

CORRESPONDENSI

Nama : Ikhsan

Email : ikhsan.baharudin@utu.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study analyzed the prosperity paradox arising from palm oil production in Indonesia, with a focus on its impact on rural poverty. Despite the industry's significant contribution to economic growth, many smallholder farmers and local communities remain trapped in poverty. Using a Systematic Literature Review (SLR) method, the study comprehensively identifies and synthesizes relevant evidence on this issue. The findings show that while the palm oil sector creates jobs and increases incomes for some, inequities in the distribution of benefits, limited access to resources, and adverse environmental impacts are significant barriers to smallholder well-being. The conclusion from this study shows that there is a need for greater attention from the Indonesian government to improve smallholder well-being and ensure environmental sustainability in the palm oil industry through inclusive policies. Recommendations include increased support to develop farmer capacity and protection of local community rights. With these steps, it is hoped that the benefits of the palm oil industry can be felt more equitably by all parties involved.

Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak produksi kelapa sawit terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Dengan menggunakan teori ekonomi pembangunan pedesaan, seperti pertumbuhan lokal, akses terhadap sumber daya, dampak sosial, dan lingkungan dari produksi kelapa sawit (Rahayu et al., 2023; Suryadi et al., 2020). Terutama bagaimana kebijakan pemerintah dan praktik industri dapat memengaruhi kondisi kehidupan petani, terutama berkontribusi pada permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh petani sawit.

Kemiskinan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sebuah keadaan ketika individu atau rumah tangga petani sawit tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Pipian et al., 2023). Sedangkan, produksi kelapa sawit merujuk pada seluruh proses budidaya, pengolahan, dan distribusi minyak sawit yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit.

Industri kelapa sawit di dunia terus menjadi wacana pro dan kontra, terutama dalam perspektif global (Fatima et al., 2024). Di satu sisi, sektor ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian negara-negara penghasil, seperti Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria termasuk Indonesia, yang menyuplai sekitar 59% dari total

produksi minyak sawit dunia. Ekspor minyak kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, industri ini menghadapi kritik tajam terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti deforestasi yang masif dan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global.

Perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit juga sering kali dianggap oleh lembaga lingkungan hidup dan konservasi seperti *Greenpeace*, *World Wildlife Fund (WWF)*, *Rainforest Alliance*, dan *Friends of the Earth* sebagai faktor utama yang dapat mengorbankan keanekaragaman hayati dan kesehatan ekosistem, sehingga menciptakan dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Lembaga-lembaga ini menyoroti bahwa konversi hutan menjadi lahan perkebunan tidak hanya menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida dan limbah industri.

Sedangkan di Indonesia, kelapa sawit telah menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2023, produksi kelapa sawit mencapai sekitar 46,99 juta ton, mengalami sedikit peningkatan dari 46,82 juta ton pada tahun sebelumnya. Meskipun ada fluktuasi dalam angka produksi, tren umum menunjukkan bahwa sektor ini tetap vital bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Luas lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit juga terus berkembang. Pada tahun 2016, luas areal kelapa sawit di Indonesia tercatat sekitar 11 juta hektar, dengan sekitar 4,58 juta hektar dikelola oleh petani kecil. Sisa lahan tersebut dibagi antara perusahaan negara dan swasta. Data terbaru menunjukkan bahwa luas lahan terus meningkat seiring dengan permintaan global yang tinggi terhadap minyak sawit.

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia juga menunjukkan tren positif. Nilai ekspor pada tahun 2016 mencapai Rp 240 triliun, dan rata-rata pertumbuhan ekspor kelapa sawit diperkirakan mencapai sekitar 36% per tahun. Hal ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia. Sekitar 16 juta orang terlibat dalam industri kelapa sawit di Indonesia, dengan mayoritas merupakan petani kecil yang mengelola kebun mereka secara mandiri atau dalam kelompok. Namun, di balik kesuksesan ini, terdapat paradoks yang mencolok, meskipun produksi kelapa sawit berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, banyak petani sawit yang masih terjebak dalam kemiskinan.

Selama ini studi tentang kelapa sawit telah terlalu lama membatasi diri dalam kajian pertanian (Bahri & Paman, 2012) dan lingkungan (Normalinda & An'Amta, 2024), sehingga kajian kelapa sawit dari sisi kemiskinan petani masih sangat terbatas. Alasannya adalah fokus yang berlebihan pada aspek produktivitas dan keuntungan finansial sering mengabaikan kondisi sosial ekonomi petani kecil, yang merupakan aktor penting dalam industri ini. Selain itu, kurangnya data yang mendalam mengenai kehidupan sehari-hari petani, akses mereka terhadap sumber daya, dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha kelapa sawit juga menjadi faktor penyebab minimnya penelitian di area ini. Dengan memahami perspektif kemiskinan petani, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam industri kelapa sawit. Gambar 1 menunjukkan peta kajian kelapa sawit selama ini.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara mengkategorikan temuan berdasarkan tema-tema utama seperti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari produksi kelapa sawit. Peneliti akan mengevaluasi metodologi yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya serta hasil-hasil yang diperoleh untuk menilai konsistensi dan validitas temuan tersebut. Selain itu, analisis deskriptif dan tematik akan digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel-variabel yang relevan. Sintesis dari hasil-hasil penelitian ini selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan yang komprehensif, memberikan wawasan baru tentang hubungan antara produksi kelapa sawit dan kemiskinan di pedesaan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan SLR, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit sambil mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Ekonomi Produksi Kelapa Sawit terhadap Pendapatan Petani

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendapatan petani kelapa sawit di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan petani di sektor pertanian lainnya. Menurut data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pendapatan petani sawit berkisar antara USD 960 hingga USD 3.340 per hektar per tahun, sementara petani karet hanya mencapai USD 720 per hektar, dan petani padi sekitar USD 280 per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya kelapa sawit menawarkan keuntungan ekonomi yang lebih signifikan bagi petani dibandingkan dengan komoditas pertanian lainnya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun pendapatan petani kelapa sawit lebih tinggi, rata-rata penghasilan petani di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, pendapatan bersih rata-rata petani skala kecil hanya mencapai Rp5,23 juta per tahun, atau sekitar Rp435.833 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan. Produksi kelapa sawit memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani di wilayah pedesaan, terutama di daerah yang menjadikannya sebagai komoditas utama.

Data dari Provinsi Jambi menunjukkan bahwa desa dengan dominasi kelapa sawit memiliki pendapatan rumah tangga rata-rata sebesar Rp15,5 juta per tahun per orang dewasa, sementara desa berbasis tanaman pangan hanya mencapai Rp10,6 juta per tahun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga tani kelapa sawit di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, yang menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga tani kelapa sawit di daerah tersebut mencapai Rp2.572.479 per bulan. Dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp1.638.214 per bulan, rumah tangga tani di Kecamatan Bajubang termasuk dalam kategori kesejahteraan tinggi (Adimarta et al., 2022). Kedua temuan ini menggambarkan bahwa dominasi perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga, meskipun perbedaan signifikan terlihat antara desa-desa berbasis kelapa sawit dan tanaman pangan.

Penelitian menunjukkan bahwa petani yang terlibat dalam produksi kelapa sawit cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan petani yang mengandalkan sektor pertanian tradisional seperti padi atau jagung. Tingginya permintaan global terhadap minyak kelapa sawit menjadikannya salah satu komoditas dengan keuntungan ekonomi paling tinggi. Selain itu, kelapa sawit memiliki efisiensi lahan yang lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan lainnya. Namun, keuntungan yang diperoleh dari kelapa sawit tidak selalu merata. Ketergantungan pada harga pasar global yang fluktuatif menjadi salah satu tantangan terbesar bagi petani kelapa sawit.

Fluktuasi harga minyak kelapa sawit dapat menyebabkan pendapatan petani berkurang drastis, terutama bagi mereka yang tidak memiliki diversifikasi sumber penghasilan. Biaya produksi yang tinggi, seperti untuk pupuk dan pestisida, juga menjadi hambatan bagi petani kecil. Sebagai contoh, biaya pupuk dapat mencapai 30% dari total biaya operasional petani. Infrastruktur yang buruk di wilayah pedesaan juga meningkatkan biaya logistik, mengurangi pendapatan bersih petani hingga 15%. Selain meningkatkan pendapatan, produksi kelapa sawit juga memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas. Di desa-desa yang didominasi perkebunan kelapa sawit, akses terhadap layanan kesehatan meningkat hingga 25% dibandingkan dengan desa berbasis tanaman pangan. Hal ini terjadi karena pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan rumah tangga untuk membiayai perawatan kesehatan yang lebih baik. Jika dibandingkan dengan sektor pertanian lain, petani kelapa sawit memiliki keunggulan signifikan dalam hal pendapatan dan stabilitas ekonomi.

Petani di sektor tradisional seperti padi dan jagung lebih rentan terhadap risiko gagal panen akibat perubahan iklim dan serangan hama, yang berdampak pada stabilitas pendapatan mereka. Di sisi lain, pengembangan kelapa sawit juga membuka peluang kerja tambahan di sektor non-pertanian. Data dari (Hadinata et al., 2024) menunjukkan bahwa rumah tangga non-pertanian di desa berbasis kelapa sawit memperoleh hingga 40% pendapatan mereka dari pekerjaan di perkebunan atau industri terkait. Hal ini memberikan dampak positif, khususnya bagi rumah tangga yang sering kali termasuk dalam kelompok termiskin di pedesaan (Bahri & Paman, 2012).



Gambar 2. Pendapatan Tahunan Petani Berdasarkan Komoditas (USD per Hektar)

Sumber: GAPKI & PASPI (2024)

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa petani kelapa sawit memiliki pendapatan tahunan tertinggi, yaitu \$3.340 per hektar, jauh melampaui komoditas lain seperti karet (\$720), padi (\$280), dan ubi kayu (\$190). Perbedaan pendapatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menawarkan peluang ekonomi yang lebih menguntungkan bagi petani dibandingkan dengan sektor pertanian tradisional. Keunggulan ini terutama disebabkan oleh permintaan minyak sawit yang tinggi di pasar global serta produktivitas kelapa sawit yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Namun, meskipun pendapatan petani kelapa sawit lebih tinggi, fluktuasi harga di pasar internasional dapat berdampak besar terhadap stabilitas pendapatan mereka.

Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sangat dipengaruhi oleh permintaan global, kebijakan ekspor, serta tekanan dari regulasi keberlanjutan yang diterapkan oleh Uni Eropa dan negara-negara importir lainnya. Ketika harga CPO mengalami penurunan, petani kecil yang tidak memiliki cadangan keuangan memadai bisa mengalami kesulitan dalam menutupi biaya produksi, yang mencakup pembelian pupuk, pestisida, serta biaya tenaga kerja. Di sisi lain, petani di sektor pertanian lain seperti padi dan ubi kayu menghadapi tantangan yang berbeda, terutama terkait ketergantungan pada faktor lingkungan seperti cuaca dan risiko gagal panen akibat serangan hama. Harga komoditas pangan juga sering kali dipengaruhi oleh kebijakan subsidi pemerintah dan mekanisme pasar domestik, yang membuat pendapatan mereka lebih tidak stabil dibandingkan dengan petani kelapa sawit.

Meskipun kelapa sawit memberikan pendapatan lebih tinggi, industri ini juga menghadapi tantangan keberlanjutan dan ketimpangan distribusi keuntungan. Petani kecil yang tergabung dalam skema plasma dengan perusahaan perkebunan besar sering kali memiliki kontrol terbatas terhadap produksi dan harga jual, sehingga mereka tidak selalu mendapatkan keuntungan optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi yang adil bagi masyarakat pedesaan, sambil tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Konflik Agraria dan Akses terhadap Sumber Daya

Konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan ketimpangan struktural dalam penguasaan dan akses terhadap sumber daya alam yang semakin tajam. Berdasarkan data yang tersedia, sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar konflik agraria dengan 111 kasus, diikuti oleh infrastruktur sebanyak 79 kasus, serta pertambangan dengan 41 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tren ini menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan dan menegaskan bahwa konflik agraria bukan sekadar persoalan kepemilikan tanah, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas.



Gambar 3. Jumlah Kasus Konflik Agraria Tahun 2024

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Konflik di sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, menjadi yang paling dominan. Ekspansi industri perkebunan yang terus meluas sering kali dilakukan dengan mengorbankan lahan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat adat dan petani kecil. Banyak kasus menunjukkan bahwa tanah yang telah lama ditempati dan diolah oleh masyarakat secara turun-temurun justru dialihkan untuk kepentingan korporasi dengan dukungan regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap tanah sebagai sumber utama penghidupan mereka, menciptakan dampak sosial yang berkepanjangan seperti meningkatnya kemiskinan, migrasi paksa, hingga ketegangan sosial yang dapat berujung pada konflik horizontal.

Di sektor infrastruktur, konflik agraria banyak terjadi akibat proyek pembangunan jalan tol, bendungan, bandara, dan proyek strategis nasional lainnya yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat terdampak. Proses pengadaan lahan yang tidak transparan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, serta kurangnya mekanisme ganti rugi yang adil menjadi faktor utama pemicu konflik. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat yang menolak penggusuran justru mengalami intimidasi, tekanan, dan bahkan kriminalisasi. Fenomena ini mencerminkan bagaimana pembangunan yang diklaim sebagai bagian dari kemajuan justru menciptakan ketimpangan dan memperburuk akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber penghidupan mereka.

Sementara itu, sektor pertambangan juga menjadi pemicu konflik agraria yang cukup besar. Dengan 41 kasus yang tercatat, konflik di sektor ini umumnya berakar pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Aktivitas pertambangan skala besar sering kali merusak ekosistem lokal, mencemari air dan tanah, serta menggusur masyarakat dari tempat tinggal dan lahan pertanian mereka. Dalam banyak kasus, masyarakat yang menentang ekspansi tambang menghadapi berbagai bentuk represi, mulai dari intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik. Di sisi lain, kehadiran tambang juga kerap menciptakan ketimpangan

ekonomi di tingkat lokal, di mana hanya segelintir pihak yang menikmati keuntungan sementara mayoritas masyarakat harus menanggung dampak negatifnya.

Secara keseluruhan, meningkatnya jumlah konflik agraria ini menunjukkan bahwa akses terhadap tanah dan sumber daya alam masih menjadi persoalan fundamental yang belum terselesaikan di Indonesia. Ketimpangan dalam penguasaan lahan semakin nyata, di mana kepemilikan tanah terkonsentrasi pada segelintir elite ekonomi dan politik, sementara masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal harus berjuang mempertahankan hak-haknya. Sayangnya, dalam banyak kasus, upaya masyarakat untuk memperjuangkan tanahnya justru dibalas dengan tindakan represif. Aparat keamanan sering kali lebih berpihak pada kepentingan korporasi, sementara kebijakan agraria yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok rentan. Peningkatan konflik agraria ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, proyek-proyek investasi, baik yang berskala nasional maupun internasional, sering kali diprioritaskan dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama bermukim di suatu wilayah. Hal ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam kebijakan tata kelola sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal dibandingkan dengan masyarakat kecil.

Tanpa adanya reformasi agraria yang adil dan menyeluruh, konflik-konflik ini akan terus berulang dan berpotensi meningkat dalam skala yang lebih besar. Diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat adat, petani, dan komunitas lokal memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan masa depan tanah dan sumber daya yang mereka miliki. Selain itu, penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan pendekatan yang berbasis keadilan sosial, bukan sekadar mekanisme hukum yang cenderung memihak kepentingan korporasi. Jika tidak ada perubahan dalam kebijakan agraria dan tata kelola sumber daya alam, maka konflik agraria akan terus menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja, membawa dampak serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Salah satu pemicu utama konflik agraria dalam ekspansi kelapa sawit adalah tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat. Banyak komunitas adat yang mengklaim tanah tersebut berdasarkan sistem kepemilikan tradisional yang diakui turun-temurun, sementara pemerintah sering kali memberikan izin kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi di sektor kelapa sawit sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan dan hak asasi manusia. Pemberian izin konsesi lahan secara masif kepada perusahaan besar mengakibatkan marginalisasi petani kecil dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka.

Deforestasi yang terjadi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit juga menjadi pemicu konflik yang signifikan. Pembukaan lahan secara besar-besaran tidak hanya menghilangkan habitat satwa liar tetapi juga mengurangi kualitas tanah dan sumber air yang penting bagi masyarakat lokal. Kerusakan lingkungan ini sering kali memicu

perlawanan dari komunitas setempat yang terdampak secara langsung. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari konflik agraria ini. Banyak laporan menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan sering menggunakan cara-cara represif, termasuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan masyarakat yang menolak pengambilalihan lahan mereka. Hal ini semakin memperkuat ketidakadilan struktural yang dialami oleh masyarakat terdampak.

Salah satu bentuk perlawanan masyarakat terhadap ekspansi kelapa sawit adalah melalui gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak agraria mereka. Di Indonesia, misalnya, organisasi masyarakat sipil sering kali berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk menekan pemerintah dan perusahaan agar lebih transparan dalam pengelolaan lahan serta menghormati hak-hak masyarakat adat. Ekspansi kelapa sawit juga berdampak pada relasi sosial di komunitas lokal. Perubahan sistem produksi dari pertanian subsisten ke sistem monokultur komersial menciptakan ketimpangan ekonomi, di mana hanya segelintir individu yang mendapatkan manfaat besar dari investasi perkebunan, sementara mayoritas masyarakat kehilangan tanah dan mata pencaharian mereka.

Di beberapa negara, seperti Kolombia dan Peru, konflik agraria akibat kelapa sawit sering kali dikaitkan dengan praktik perampasan tanah yang dilakukan oleh aktor-aktor bersenjata. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal dipaksa meninggalkan tanah mereka melalui intimidasi dan kekerasan demi memberikan ruang bagi ekspansi perkebunan besar. Konflik agraria ini juga memiliki dimensi gender yang signifikan. Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak, karena mereka kehilangan akses terhadap lahan yang sebelumnya digunakan untuk produksi pangan keluarga. Selain itu, mereka juga rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit yang sering kali memiliki kondisi kerja yang buruk.

Dari perspektif ekonomi, meskipun industri kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan lapangan kerja, manfaatnya tidak merata. Petani kecil sering kali tidak memiliki akses terhadap pasar yang adil dan hanya berperan sebagai buruh dengan upah rendah dalam rantai pasok industri ini. Di beberapa kasus, penyelesaian konflik agraria akibat ekspansi kelapa sawit menemui jalan buntu karena kurangnya mekanisme hukum yang berpihak pada masyarakat. Proses hukum sering kali lamban dan berpihak kepada perusahaan, mengakibatkan ketidakadilan yang berlarut-larut bagi komunitas yang kehilangan tanah mereka. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan dalam industri kelapa sawit masih jauh dari harapan. Skema sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang seharusnya menjamin keberlanjutan dan hak-hak sosial sering kali gagal diterapkan secara konsisten di lapangan. Selain itu, faktor politik juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Hubungan erat antara elit politik dan pemilik perusahaan perkebunan sering kali menyebabkan kebijakan yang lebih menguntungkan investor dibandingkan dengan masyarakat lokal. Korupsi dalam proses perizinan lahan menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketimpangan dalam distribusi kepemilikan tanah.

Konflik agraria akibat ekspansi kelapa sawit juga sering kali berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan sering

kali menghadapi polusi udara dan air akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan dalam produksi kelapa sawit, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mereka. Selain dampak lokal, ekspansi kelapa sawit juga memiliki konsekuensi global dalam hal perubahan iklim. Deforestasi yang dilakukan untuk membuka lahan perkebunan berkontribusi terhadap meningkatnya emisi karbon, yang memperburuk pemanasan global. Hal ini menjadi perhatian utama dalam perdebatan internasional tentang keberlanjutan industri ini. Di beberapa wilayah, perlawanan terhadap ekspansi kelapa sawit telah berkembang menjadi gerakan internasional yang mengadvokasi perlindungan hak-hak masyarakat adat. Organisasi hak asasi manusia dan lingkungan sering kali mendokumentasikan berbagai kasus pelanggaran hak guna mendesak pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab.

Keterlibatan lembaga internasional dalam menangani konflik agraria ini semakin meningkat. Bank Dunia, misalnya, telah mendapatkan tekanan dari berbagai kelompok untuk tidak mendanai proyek-proyek perkebunan yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria akibat kelapa sawit bukan hanya isu nasional tetapi juga menjadi perhatian global. Meskipun banyak upaya telah dilakukan untuk mengurangi konflik agraria akibat ekspansi kelapa sawit, kenyataannya kasus-kasus baru terus bermunculan. Hal ini mencerminkan bahwa masih banyak aspek struktural dalam tata kelola agraria yang perlu diperbaiki agar keadilan bagi masyarakat lokal dapat terwujud. Dampak konflik agraria akibat ekspansi kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat sangat signifikan. Banyak komunitas kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka, menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, tekanan psikososial akibat ketidakpastian atas hak tanah dan ketakutan terhadap penggusuran paksa juga memperburuk kondisi kesehatan mental masyarakat terdampak. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga sering kali terhambat karena ketidakstabilan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik agraria ini.

Keberlanjutan Lingkungan dan Implikasinya terhadap Kemiskinan

Industri kelapa sawit telah lama menjadi sektor ekonomi utama di Indonesia. Perkebunan yang terus berkembang bertujuan untuk memenuhi permintaan global akan minyak sawit. Meskipun sektor ini berkontribusi terhadap perekonomian nasional serta menyediakan lapangan pekerjaan, dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diabaikan. Salah satu permasalahan yang paling mencolok adalah deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Menurut laporan terbaru dari Auriga Nusantara, luas hutan yang hilang di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 261.575 hektare. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar deforestasi terjadi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan proyek pembangunan lainnya. Hilangnya hutan dalam skala besar berdampak buruk terhadap ekosistem, mempercepat perubahan iklim, serta mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air, yang pada akhirnya meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Selain berkontribusi terhadap hilangnya hutan, praktik perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan juga menyebabkan degradasi tanah. Ketika lahan dibuka secara besar-besaran, unsur hara dalam tanah terkikis, sehingga kesuburannya menurun. Lama-kelamaan, lahan yang awalnya subur menjadi tandus dan sulit untuk ditanami kembali. Hal ini tidak hanya mengurangi produktivitas pertanian, tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi petani yang bergantung pada lahan tersebut untuk bertahan hidup. Di samping itu, pencemaran lingkungan akibat limbah kelapa sawit juga menjadi persoalan yang serius. Limbah cair hasil produksi minyak sawit sering kali dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan yang baik. Akibatnya, sumber air yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari tercemar, menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kulit, gangguan pencernaan, hingga risiko jangka panjang seperti keracunan akibat paparan bahan kimia berbahaya.

Meskipun industri kelapa sawit memberikan banyak lapangan kerja, kesejahteraan petani kecil tetap menjadi isu yang belum terselesaikan. Harga tandan buah segar (TBS) yang fluktuatif membuat penghasilan petani tidak menentu. Ketika harga sawit turun drastis di pasar global, mereka mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar. Tanpa adanya dukungan finansial atau akses terhadap kredit usaha yang terjangkau, banyak petani terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Ketimpangan ekonomi dalam industri ini semakin memperparah kondisi petani kecil. Sebagian besar keuntungan besar dinikmati oleh perusahaan besar, sementara petani plasma yang menjadi mitra perusahaan hanya mendapatkan sedikit bagian dari keuntungan tersebut. Banyak dari mereka juga tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih menguntungkan, sehingga harus menjual hasil panennya dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga yang diterima oleh perusahaan besar di pasar internasional. Selain aspek ekonomi, konflik lahan menjadi masalah yang semakin sering terjadi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Banyak komunitas adat kehilangan hak atas tanah mereka setelah pemerintah memberikan izin kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal. Situasi ini sering kali berujung pada kriminalisasi petani atau aktivis lingkungan yang menolak perampasan lahan, menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Di tingkat global, regulasi perdagangan yang semakin ketat juga menambah tantangan bagi petani kecil. Uni Eropa, misalnya, telah memberlakukan Undang-Undang Antideforestasi yang melarang impor minyak sawit yang berasal dari kawasan yang mengalami deforestasi. Meskipun bertujuan untuk menekan laju perusakan hutan, kebijakan ini justru membuat petani kecil kesulitan menembus pasar Eropa karena keterbatasan mereka dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan. Jika tidak ada mekanisme dukungan bagi petani kecil, kebijakan ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, berbagai pihak mulai mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Salah satu pendekatan yang mulai diperkenalkan adalah pertanian regeneratif, yang bertujuan untuk mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan ketahanan ekosistem. Metode seperti tumpangsari dan penggunaan pupuk organik menjadi alternatif bagi petani untuk mengurangi

ketergantungan pada bahan kimia serta meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Meskipun pendekatan ini menjanjikan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak petani kecil tidak memiliki akses terhadap informasi dan pelatihan yang memadai tentang pertanian regeneratif. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan organisasi lingkungan sangat diperlukan agar mereka dapat mengadopsi praktik ini dan meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa merusak lingkungan.

Di sisi kebijakan, regulasi pemerintah juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak lagi dilakukan dengan cara yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perizinan lahan dan pengelolaan limbah industri dapat membantu menekan dampak negatif yang selama ini terjadi. Selain itu, akses pasar bagi petani kecil juga perlu diperluas agar mereka tidak terus bergantung pada perusahaan besar. Skema sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa kelapa sawit yang dihasilkan memenuhi standar lingkungan dan sosial yang lebih baik. Namun, kebijakan ini harus dijalankan dengan transparan dan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi petani kecil.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi konflik agraria. Jika masyarakat lokal diberikan peran aktif dalam pengambilan keputusan, maka ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan cara yang lebih berkeadilan dan tidak merugikan komunitas yang telah lama bergantung pada lahan tersebut. Dalam jangka panjang, diversifikasi ekonomi di wilayah perkebunan kelapa sawit perlu didorong agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja. Pemerintah dapat mendorong program pengembangan usaha mikro, pariwisata berbasis ekowisata, atau agroforestri untuk memberikan alternatif sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar perkebunan.

Pendidikan dan pelatihan bagi petani juga menjadi kunci dalam membangun industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Dengan peningkatan akses terhadap pendidikan dan keterampilan, petani dapat mengelola usaha mereka dengan lebih baik serta meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memastikan industri kelapa sawit yang lebih adil dan berkelanjutan. Jika sinergi ini terwujud, maka akan lebih mudah untuk menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan menguntungkan semua pihak. Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi industri kelapa sawit adalah menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Jika dikelola dengan baik, industri ini dapat tetap menjadi pilar ekonomi nasional tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Industri kelapa sawit di Indonesia memainkan peran krusial dalam meningkatkan pendapatan petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan. Namun, meskipun sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat tidak dapat diabaikan.

Meskipun produksi kelapa sawit memungkinkan pendapatan yang lebih tinggi bagi petani dibandingkan dengan sektor pertanian tradisional, ketimpangan dalam distribusi keuntungan, ketergantungan terhadap perusahaan besar, serta fluktuasi harga pasar global tetap menjadi tantangan utama. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan turut memperburuk konflik agraria, kerusakan ekosistem, dan kemiskinan di daerah-daerah yang terdampak. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi kebijakan dan tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, disarankan agar penerapan kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian regeneratif, diperkuat. Pengawasan yang lebih ketat terhadap perizinan lahan serta pengelolaan limbah industri kelapa sawit harus diterapkan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, perlu ada upaya untuk memperluas akses pasar bagi petani kecil melalui sistem sertifikasi yang adil dan transparan, serta mendorong diversifikasi ekonomi di wilayah perkebunan kelapa sawit untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Program pendidikan dan pelatihan bagi petani perlu diperluas untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha secara lebih efisien dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan industri kelapa sawit yang lebih inklusif, berkeadilan, dan ramah lingkungan, guna memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam.

Daftar Pustaka

- Adimarta, W., Sudrajat, & Harini, R. (2022). Analisis Pendapatan dan Kesejahteraan Rumahtangga Tani Kelapa Sawit di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14043–14057. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4664/3939>
- Bahri, S., & Paman, U. (2012). Peranan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Propinsi Riau. *Dinamika Pertanian*, XXVII(3), 173–179. <https://journal.uir.ac.id/index.php/dinamikapertanian/article/view/912/583>
- Fatima, Setiawan, E., Renata, & Ramadhani, A. (2024). *Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Kelapa Sawit di Indonesia*. 26(4), 803–807.
- Hadinata, M., Aritonang, M., & Suharyani, A. (2024). DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI SAWIT SWADAYA DI DESA SANDAI KIRI KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG. *Jurnal Sains Pertanian Equator*.
- Normalinda, S., & An'Amta, D. A. A. (2024). Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Balanti Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(2), 212–221. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i2.212>
- Pipian, Sudrajat, J., & Suharyani, A. (2023). Fenomena Ketidakamanan Pangan di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit : Kasus Desa Pedalaman Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(2), 289–298. <https://doi.org/10.14710/jil.21.2.289-298>

- Rahayu, S., Qarni, W., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Di Wilayah Pedesaan (Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal). *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(4), 179–191.
- Rochgiyanti. (2022). Konflik AntaraWarga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021). *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(1), 33–44.
- Sianturi, R. K., & Bustamam, N. (2024). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 35(1).
- Suryadi, S., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit : Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kab. Pelalawan, Riau). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 367–374. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>